

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kejahatan hak milik merupakan bentuk kejahatan dengan motif ekonomi. Kejahatan hak milik terukur secara materiil. Contoh tindakan kejahatan hak milik adalah pencurian, perusakan barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan. Tindakan kejahatan hak milik merupakan bagian ekonomi karena termasuk perilaku individu yang membuat pilihan untuk mendapatkan pendapatan. Penelitian mengenai kejahatan dari perspektif ekonomi diperlukan di Indonesia karena masih terbatasnya studi mengenai perilaku kejahatan dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi, padahal jumlah tindakan kejahatan hak milik di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan spasial. Kejahatan hak milik dianalisis dengan aspek spasial karena kejadian kejahatan hak milik di suatu wilayah akan terkait dengan kejadian kejahatan di wilayah lainnya yang berdekatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel sosial-ekonomi yang signifikan memengaruhi tindakan kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat ketergantungan spasial dalam kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat merupakan pelaksana tugas kepolisian di wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayah hukum Polda Jawa Barat hampir sama dengan wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, hanya Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok yang tidak masuk pada wilayah hukum Polda Jawa Barat. Pada penelitian ini, penulis juga tidak memasukkan Polres Cimahi dan Ciamis karena perbedaan wilayah hukum dengan wilayah administrasinya. Polda Jawa Barat termasuk pada tiga kepolisian daerah dengan kejahatan hak milik tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji *goodness of fit*, model OLS menjadi model paling tepat untuk menjelaskan kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat tahun 2012, 2013 dan 2014. Hasil estimasi model OLS setiap tahunnya menunjukkan signifikansi variabel yang berbeda-beda. Signifikansi variabel yang berbeda setiap tahunnya diduga karena variabel independen yang menonjol setiap tahunnya berbeda dalam memengaruhi jumlah kejahatan hak milik. Namun, dibalik perbedaan tersebut terdapat persamaan yaitu variabel jumlah pengangguran terbuka dan jumlah personel polisi secara positif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat dari tahun 2012-2014.

Pada tahun 2015, model SAR menjadi model paling tepat berdasarkan uji *goodness of fit*. Selain hasil dari uji *goodness of fit*, model SAR dianggap relevan untuk menjelaskan kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat tahun 2015 karena signifikannya variabel *W_Crime*.. Apabila rata-rata kejahatan hak milik di

kabupaten/kota sekeliling daerah pengamatan tinggi, maka kejadian kejahatan hak milik di daerah pengamatan menjadi turun. Model SAR di tahun 2015 menunjukkan hampir semua variabel independen memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat, kecuali variabel persentase penyelesaian kasus kejahatan oleh polisi.

Jumlah pengangguran, rasio gini dan persentase penyelesaian kasus memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat dan sesuai dengan hipotesis awal. Jumlah pengangguran setiap tahunnya secara positif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Faktor jumlah pengangguran terbuka sesuai dengan hipotesis karena peningkatan pengangguran ternyata meningkatkan jumlah kejahatan hak milik sebagai pekerjaan ilegal. Rasio gini sebagai proksi ketimpangan pendapatan menunjukkan hasil positif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat pada tahun 2015. Faktor rasio gini sesuai dengan hipotesis karena peningkatan rasio gini ternyata meningkatkan jumlah kejahatan hak milik. Upaya pencegahan dengan proksi persentase penyelesaian kasus kejahatan pada tahun 2014 secara negatif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Peningkatan persentase penyelesaian kasus kejahatan akan menurunkan kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Semakin besar persentase pada *clearance rate* tersebut mencerminkan semakin besar tindakan pencegahan pada kejahatan. Hal ini diduga karena ketika kinerja polisi cepat dalam menindak kejahatan yang dilaporkan, maka akan memperbesar risiko tertangkapnya pelaku kriminal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah polisi, PDRB per kapita dan persentase penduduk miskin memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat, namun tidak sesuai dengan hipotesis awal. Jumlah personil polisi sebagai proksi upaya pencegahan kejahatan, di setiap tahunnya secara positif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Peningkatan jumlah personil polisi justru akan meningkatkan kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Hal ini diduga karena bertambahnya jumlah polisi tidak menunjukkan kualitas pencegahan tindakan kejahatan. Bertambahnya jumlah polisi belum tentu meningkatkan aktivitas pencegahan tindakan kejahatan secara langsung. Faktor pendapatan dengan proksi PDRB per kapita pada tahun 2014 dan 2015 secara positif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Peningkatan PDRB per kapita justru akan meningkatkan kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Hal ini diduga karena adanya keterkaitan spasial antar-kabupaten/kota di wilayah Polda Jawa Barat. Peningkatan

PDRB per kapita akan meningkatkan ketertarikan para pelaku kejahatan hak milik untuk melakukan tindakan kejahatan. Peningkatan PDRB per kapita membuat peluang pada kejahatan lebih menguntungkan (O'Sullivan, 2007). Faktor kemiskinan dengan proksi persentase penduduk miskin pada tahun 2012 dan 2015 secara negatif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Peningkatan persentase penduduk miskin justru akan menurunkan kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Hal ini diduga karena wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi tidak mendorong perilaku kejahatan. Tingginya tingkat kemiskinan mengindikasikan suatu wilayah tersebut diisi oleh penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran yang rendah. Kemungkinan pelaku kejahatan akan mendapat *return* yang rendah apabila melakukan tindakan kejahatan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga kasus kejahatan di wilayah tersebut rendah.

Berdasarkan analisis spasial menggunakan indeks Moran global, nilai autokorelasi spasial dari tahun 2012 sampai 2015 selalu bernilai positif, namun melalui uji t, didapat hasil bahwa nilai indeks Moran global tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat tidak memiliki autokorelasi spasial. Hasil LISA yaitu analisis autokorelasi spasial secara lokal, menunjukkan bertambahnya wilayah kabupaten yang berkorelasi spasial signifikan dengan tetangganya pada setiap tahunnya. Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah yang selalu signifikan setiap tahunnya. Secara geografis, wilayah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya bertetangga. Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya termasuk pada tipe hubungan *low-low*. Pada tahun 2012 dan tahun 2013, hanya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya yang korelasi spasialnya signifikan. Pada tahun 2014, bukan hanya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya yang korelasi spasialnya signifikan, tetapi ditambah Kabupaten Kuningan yang memiliki tipe hubungan *low-low*. Pada tahun 2015, terdapat lima wilayah yang korelasi spasialnya signifikan. Tiga wilayah dengan tipe hubungan *low-low* yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya. Dua wilayah dengan hubungan lokasi *low-high* yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Purwakarta. Lokasi dengan hubungan *low-low* menunjukkan kabupaten/kota yang satu dan kabupaten/kota tetangganya aman dari tindakan kejahatan, sehingga kabupaten/kota tersebut memiliki jumlah kejahatan yang rendah. Tipe hubungan *low-high* adalah kabupaten/kota dengan tindakan kejahatan rendah, namun dikelilingi oleh kabupaten/kota dengan tindakan kejahatan tinggi. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan pelaku kejahatan ke kabupaten/kota tetangganya, sehingga tindakan kejahatan kabupaten/kota tetangganya memiliki jumlah kejahatan yang tinggi. Adanya keterkaitan kejahatan antar-daerah yang berdekatan diduga karena adanya penyebaran kejahatan akibat

kondisi sosial-ekonomi yang berbeda antar-daerah. Kejahatan menjadi bagian dari *spillover* negatif dari tingkat pembangunan atau kondisi ekonomi yang berbeda antar-daerah.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan, penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa pada tahun 2012-2015, kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi. Faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat berbeda-beda setiap tahunnya. Selain itu, terdapat ketergantungan spasial pada jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat karena jumlah kasus kejahatan hak milik di beberapa wilayah Polres kota/kabupaten di Polda Jawa Barat memiliki korelasi dengan wilayah Polres kota/kabupaten tetangganya.

5.2 Saran

Topik penelitian mengenai mengenai kejahatan dari perspektif ekonomi di Indonesia masih jarang dilakukan dan menarik untuk dikembangkan. Penelitian mengenai pendekatan ekonomi spasial kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat masih belum sempurna karena adanya beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan data menyebabkan data yang digunakan penulis kurang spesifik menjelaskan variabel. Contohnya adalah variabel jumlah kejahatan hak milik yang diwakili oleh jumlah tindak pidana umum dan variabel jumlah personil polisi yang digunakan adalah total polisi dari berbagai satuan dengan berbagai tugas yang berbeda. Seharusnya, penulis menggunakan data kejahatan hak milik atau properti dan jumlah personil polisi yang digunakan adalah jumlah personil polisi yang melakukan pencegahan atau penindakan langsung terhadap kejahatan hak milik. Kedua, untuk melakukan teknik estimasi yang lebih baik, penulis perlu menambah data *cross-section* atau melakukan teknik estimasi dengan menggunakan data panel. Ketiga, penulis perlu mempertimbangkan kedekatan objek penelitian dengan wilayah DKI Jakarta. Tindakan kejahatan di wilayah Polda Jawa Barat diduga akan lebih kuat dipengaruhi oleh DKI Jakarta karena wilayah Polda Metro Jaya sebagai pelaksana tugas kepolisian di wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tindakan kejahatan tertinggi se-Indonesia. Keempat, untuk penelitian di masa yang akan datang, lebih baik menggunakan objek penelitian dengan ukuran wilayah yang lebih kecil, seperti penelitian di tingkat Polsek (Kepolisian Sektor) atau kecamatan. Karena dinamika spasial akan lebih kuat terekam pada wilayah yang lebih kecil sehingga memungkinkan analisis korelasi antar-wilayah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi tindakan kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan jumlah pengangguran lebih diprioritaskan.
2. Pemerintah meningkatkan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pencegahan yang dilakukan polisi (dalam upaya meningkatkan kualitas) dan menambah jumlah personil polisi (dalam upaya meningkatkan kuantitas) di satuan yang melakukan pencegahan atau penindakan langsung terhadap kejahatan hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselin, L. (1988). *Spatial econometrics: Method and models*. Dordrecht, Netherland: Kluwer Academic Publishers.
- Anselin, L. (2003). Spatial externalities, spatial multipliers, and spatial econometrics. *International Regional Science Review*, 26(2), 153-166.
- Anselin, L. (2005). *Exploring spatial data with GeoDa: A workbook spatial analysis laboratory*. Department of Geography, University of Illinois, Urbana-Champaign.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Jawa Barat dalam angka 2013*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Statistik kriminal 2013*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Jawa Barat dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik kriminal 2014*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Jawa Barat dalam angka 2015*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik kriminal 2015*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Jawa Barat dalam angka 2016*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik kriminal 2016*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Gini ratio provinsi 2002-2017*. Dipetik Juli 11, 2018, dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116>
- Badan Pusat Statistik. (2018, Mei 9). *Gini ratio menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016*. Dipetik Juli 11, 2018, dari Badan Pusat Statistik: <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/11/16/128/rasio-gini-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-tahun-2011-2016.html>
- Badan Pusat Statistik. (2018, Maret 8). *Gini ratio Provinsi Jawa Barat 2002-2017*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://jabar.bps.go.id/statictable/2017/07/25/193/gini-ratio-provinsi-jawa-barat-2002-2017.html>
- Badan Pusat Statistik. (2018, April 27). *Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) menurut kabupaten/kota di Jawa Barat, 2002-2016*. Dipetik Juli 11, 2018, dari Badan Pusat Statistik: <https://jabar.bps.go.id/statictable/2016/10/13/121/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-ribu-orang-2002-2016.html>
- Badan Pusat Statistik. (2018, Juli 23). *Jumlah penduduk miskin menurut provinsi, 2007-2018*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2017.html>
- Badan Pusat Statistik. (2018, April 27). *Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Barat (persen), 2002-2016*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://jabar.bps.go.id/statictable/2016/10/13/122/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-persen-2002-2016.html>
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.

- Becsi, Z. (1999). Economics and crime in the states. *Federal Reserve Bank of Atlanta - Economic Review*, 84(1), 38-56.
- Berstein, J., & Houston, E. (2000). *Crime and work: What we can learn from the low-wage labor market*. Washington DC: Economic Policy Institute.
- Brosnan, S. (2018). The socioeconomic determinants of crime in Ireland from 2003-2012. *The Economic and Social Review*, 49(2), 127-143.
- Bushway, S., & Reuter, P. (2001). Labor Markets and Crime. Dalam J. Q. Wilson, & J. Petersilia, *Crime: Public policies for crime control* (hal. 191-224). Oakland: Institute for Contemporary Studies Press.
- Chen, Y. (2013, July). New approaches for calculating moran's index of spatial autocorrelation. *PLOS ONE*, 8(7), 1-27.
- Dhewy, R. C. (2015, Oktober). Analisis spasial autokorelasi pada data persentase wanita pernah kawin dan tidak pernah menggunakan alat/cara KB di Provinsi Lampung. *Jurnal Edukasi*, 1(2), 197-203.
- Edmark, K. (2005). Unemployment and crime: Is there a connection? *Scandinavian Journal of Economics*, 107(2), 353-373.
- Ehrlich, I. (1996). Crime, punishment, and the market for offenses. *The Journal of Economic Perspectives*, 10(1), 43-67.
- Entorf, H., & Spengler, H. (1998). Socio-economic and demographic factors of crime in Germany: Evidence from panel data of the German states. *ZEW Discussion Papers*, 98(16), 1-43.
- Erdogan, S., Yalcin, M., & Dereli, M. A. (2013). Exploratory spatial analysis of crimes against property in Turkey. *Crime, Law, and Social Change*, 59(1), 63-78.
- Fatati, I. F., Wijayanto, H., & Soleh, A. M. (2017). Analisis regresi spasial dan pola penyebaran pada kasus demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi Jawa Tengah. *Media Statistika*, 10(2), 95-105.
- Francesca, M. C., & Uberti, T. E. (2008, Februari). Geographical distribution of crime in Italian Provinces: A spatial econometric analysis. *Fondazione Eni Enrico Mattei*, 29(1), 1-28.
- GeoDa. (2018, April 21). *Local spatial autocorrelation (1)*. Diambil kembali dari GeoDa an Introduction to Spatial Data Analysis: https://geodacenter.github.io/workbook/6a_local_auto/lab6a.html
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometrics* (4th ed.). New York: The McGraw-Hill Companies.
- Haga, W. J. (1987). *A survey of economics models of criminal behavior*. Monterey: Personnel Security Research and Education Center.
- Hardianto, F. N. (2009, Agustus). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia dari pendekatan ekonomi. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 13(2), 28-41.
- Hsieh, C.-C., & Pugh, M. D. (1993). Poverty, income inequality, and violent crime: A meta-analysis of recent aggregate data studies. *Crime Justice Review*, 18(2), 182-202.

- Kapuscinski, C. A., Braithwaite, J., & Chapman, B. (1998). Unemployment and crime: Toward resolving the paradox. *Journal of Quantitative Criminology*, 14(3), 215-243.
- Lectlaw.com. (t.thn.). *Blue-collar crime*. Diambil kembali dari The 'Lectric Law Library: <https://www.lectlaw.com/mjl/cl020.htm>
- Lederman, D., Fajnzylber, P., & Loayza, N. (2001). Inequality and violent crime. *The Journal of Law and Economics*, 45(1), 1-39.
- Levitt, S. D. (2004). Understanding why crime fell in the 1990s: Four factors that explain the decline and six that do not. *Journal of Economic Perspectives*, 18(1), 163-190.
- Levitt, S. D., & Miles, T. J. (2006). Economic contributions to the understanding of crime. *Annual Review of Law and Social Science*, 2(1), 147-164.
- Marselli, R., & Vannini, M. (1997). Estimating a crime equation in the presence of organized crime: Evidence from Italy. *International Review of Law and Economics*, 17(1), 89-113.
- Nugroho, A. H., & Harmadi, S. H. (2015, Januari). Analisis spasial kriminalitas harta benda di wilayah Jabodetabek. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(2), 158-172.
- Oliver, A. (2002). The economics of crime: An analysis of crime rates in America. *The Park Place Economist*, 10(1), 30-35.
- O'Sullivan, A. (2007). *Urban economics, 6th edition*. New York: McGraw-Hill.
- Raphael, S., & Winter-Ebmer, R. (2001). Identifying the effect of unemployment on crime. *The Journal of Law and Economics*, 44(1), 259-283.
- Sirusa Badan Pusat Statistik. (2018). *Koefisien gini*. Diambil kembali dari Sistem Informasi Rujukan Statistik: <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=22>
- Sirusa Badan Pusat Statistik. (2018). *Penduduk miskin*. Diambil kembali dari Sistem Informasi Rujukan Statistik: <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=2369>
- Sirusa Badan Pusat Statistik. (2018). *Persentase penduduk miskin*. Diambil kembali dari Sistem Informasi Rujukan Statistik: <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=18>
- Wuryandari, T., Hoyyi, A., Kusumawardani, D. S., & Rahmawati, D. (2014, Juni). Identifikasi autokorelasi spasial pada jumlah pengangguran di Jawa Tengah menggunakan indeks moran. *Media Statistika*, 7(1), 1-10.
- Zhukov, Y. M. (2010, Januari 16). *Spatial autocorrelation*. Diambil kembali dari IQQS, Harvard University.